

PENGUATAN KELOMPOK TANI: LANGKAH AWAL PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Farmers' Groups Empowerment as an Initial Step to Farmers' Welfare Improvement

Hermanto dan Dewa K.S. Swastika

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

Naskah masuk : 8 April 2011

Naskah diterima: 29 September 2011

ABSTRACT

This paper aims to describe the strategic policy required for strengthening farmers' groups to improve farmers' welfare. Besides many farmers' groups established, however, it is quite difficult now to find the active farmers' groups in which the members take advantage of these institutions to enhance their farming performance for their welfare. Actually, farmers play important role in moving agricultural development. Institutional strengthening is essential to carry out e done through several measures, among others: (1) encouraging and guiding farmers to cooperate in the economic field as a group; (2) developing farmers' groups through increased assistance and access to capital, improving bargaining power, enhancing guidance to the groups, and developing farm efficiency; and (3) improving human resources capacity of farmers through various assistance activities and trainings designed specifically for the management and members of the groups. Strengthening farmers' groups can be technically conducted by Agricultural Extension Workers (PPL). Nevertheless, coaching and assistance for farmers' groups can also be done by NGOs and other organizations deemed capable of doing these tasks.

Key words: *strengthening, farmers' groups, welfare, farmers*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk penguatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kendati lembaga kelompok tani telah demikian banyak dibentuk, namun cukup sulit saat ini untuk menemukan kelompok tani yang aktif, di mana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-

kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dipandang mampu untuk dilibatkan dalam penguatan kelompok tani.

Kata kunci : *penguatan, kelompok tani, kesejahteraan, petani*

PENDAHULUAN

Kelompok tani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk secara langsung mengorganisir para petani dalam berusahatani. Kementerian Pertanian mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani dibentuk oleh dan untuk petani, guna mengatasi masalah bersama dalam usahatani serta menguatkan posisi tawar petani, baik dalam pasar sarana maupun pasar produk pertanian.

Sejak program Bimbingan Massal (Bimas) tahun 1968 dan Intensifikasi Khusus (Insus) tahun 1979, Supra Insus tahun 1986/87, peran kelompok tani makin signifikan. Bahkan pembentukan kelompok tani seakan menjadi kewajiban, bukan kebutuhan petani. Penyaluran kredit usahatani (KUT) dan program-program bantuan pemerintah untuk pertanian selalu disalurkan melalui kelompok tani, karena dinilai lebih efisien. Konsekuensinya, semua desa harus membentuk kelompok tani untuk mendapat fasilitas layanan pemerintah. Semua petani secara otomatis dijadikan sebagai anggota kelompok. Tidak mengherankan jika banyak petani yang tidak tahu mereka termasuk sebagai anggota kelompok apa dan siapa ketua kelompoknya.

Belakangan ini kelompok tani diperbesar menjadi gabungan kelompok tani pada satu wilayah administratif (desa) atau dikenal dengan istilah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan, "Gabungan Kelompok Tani" adalah merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya (Syahyuti, 2007). Karena itu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kemudian dikenal sebagai wadah kerjasama antar kelompok tani.

Alasan pembentukan Gapoktan secara ekonomi dapat dipandang sebagai upaya menghindari biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh para anggotanya karena adanya masalah penumpang kepentingan (*free rider*), komitmen dan loyalitas yang berbeda, serta faktor eksternal (Zakaria, 2003; Hermanto, 2007). Meskipun demikian paradigma pembentukan Gabungan Kelompok Tani kurang tepat karena cenderung membuat kelompok tersebut menjadi kelompok formal. Sampai akhir tahun 2006 jumlah kelompok tani tercatat 293.568 kelompok dan Gapoktan sebanyak 3.000 kelompok. (Budi dan Aminah, 2009).

Peningkatan jumlah kelompok tani tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas sehingga masih banyak kelompok tani belum mampu mandiri atau masih tetap ditentukan dari atas dalam berbagai hal seperti dalam menentukan jenis komoditas yang diusahakan, menentukan pasar, menentukan mitra usaha, menentukan harga komoditas dan sebagainya. Akibatnya, kualitas kelompok tani yang terbentuk tidak dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, sehingga pengembangannya belum signifikan meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri untuk menjadi mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan fungsi kelompok tani, dan keberadaan kelompok tani berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman penulis di beberapa daerah. Meskipun kenyataannya, masyarakat tani di beberapa daerah memiliki struktur sosial yang berbeda, tulisan ini juga akan menggambarkan potensi, kendala dan langkah-langkah strategis penguatan kelompok tani dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan petani.

PERAN DAN FUNGSI KELOMPOK TANI

Kelompok tani sebagai bagian integral pembangunan pertanian memiliki peran dan fungsi penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian di pedesaan. Kelompok tani inilah pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di pedesaan. Dalam hal ini keberadaan kelompok tani dapat memainkan peran tunggal atau ganda, seperti penyediaan input usahatani (misalnya pupuk), penyediaan modal (misalnya simpan pinjam), penyediaan air irigasi (kerjasama dengan P3A), penyediaan informasi (penyuluhan melalui kelompok tani), serta pemasaran hasil secara kolektif.

Secara konseptual peran kelompok tani lebih merupakan suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggotanya. Kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen, dan sebagainya. Pemilihan kegiatan kelompok tani ini sangat tergantung pada kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial ekonomi,

keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana tiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari kelompok tani.

Peranan kelompok tani juga dapat dimainkan tiap waktu oleh pemimpin kelompok maupun oleh anggota lainnya. Pemimpin kelompok tani memiliki peran sebagai *coordinator*, dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat dan saran, sementara tiap anggota dalam kelompok tentu boleh memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. Disamping itu, pemimpin kelompok juga sebagai penggerak (*energizer*) kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, dan berusaha merangsang atau memberi semangat pada kelompok agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan.

Meningkatnya partisipasi anggota kelompok akan meningkatkan kedinamisan kelompok. Kedinamisan tersebut akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Kelompok tani yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan ataupun interaksi, baik di dalam maupun dengan pihak luar dalam upaya mencapai tujuan kelompok.

Sebagai organisasi sosial masyarakat, kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar-mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam usahatani dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan yang bertambah, dan kehidupan lebih sejahtera. Selain itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai wahana kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani, serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Terakhir kelompok tani juga berfungsi sebagai unit produksi, yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Saat ini kondisi sebagian besar kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan stasioner bahkan menurun. Secara empiris gambaran dari kelompok tani tersebut sebagai berikut: (1) sebagian kelas kelompoknya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, status kelasnya lebih tinggi namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya rendah, dan (2) sebagian kelompok tani sudah “bubar” namun masih terdaftar.

Rendahnya kinerja kelompok tani yang ada antara lain disebabkan rendahnya peran pengurus kelompok tani, anggota kelompok tidak jelas, struktur organisasi tidak lengkap dan tidak berfungsi, produktivitas usahatani rendah dan

kurangnya pembinaan dari aparat penyuluh. Selain itu, pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya (Hermanto *et al.*, 2010). Bahkan kelompok tani sering dibentuk secara temporer yang hanya aktif pada saat-saat tertentu, seperti ketika ada pendistribusian bantuan pupuk bersubsidi, kredit bersubsidi, atau bantuan-bantuan lainnya.

Umumnya kelompok tani yang ada sekarang ini merupakan hasil dari kegiatan proyek-proyek sehingga tidak jarang selesainya proyek, banyak kelompok tani yang tidak dapat mempertahankan kelompoknya atau hanya tinggal nama saja. Namun ada juga kelompok tani yang makin maju walaupun tidak ada lagi proyek atau bantuan yang diterima. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas kelompok tani melalui serangkaian pembinaan sangat penting dilakukan untuk mewujudkan kemandirian kelompok tani dan kesejahteraan petani.

Pentingnya pembinaan kelompok tani juga dikemukakan oleh Mosher (1987) bahwa salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan petani yang tergabung dalam kelompok tani. Menurut Djiwandi (1994), mengembangkan kelompok tani berarti membangun kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri agar dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Disamping itu agar mereka dapat bergerak secara terorganisir dan berdayaguna. Suatu gerakan kelompok tani yang tidak terorganisir dan tidak mengikuti kerjasama menurut pola-pola yang maju, tidak akan memecahkan permasalahan yang dihadapi petani (Suntoro, 2007).

Pembentukan dan penumbuhan kelompok tani mestilah ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Rural Development*). Kelompok tani hanyalah alat, dan merupakan salah satu opsi kelembagaan yang dapat dipilih, bukan tujuan dan juga bukan keharusan. Oleh karena itu, penggunaan kelompok tani yang semata-mata hanya untuk mensukseskan kegiatan lain, dan bukan untuk pengembangan kelompok tani itu sendiri, sebagaimana selama ini; hanya akan berakhir dengan kelompok tani yang semu, yang tidak akan pernah eksis secara riil.

BEBERAPA STUDI KASUS

Studi Kasus Di Bangka Belitung

Kelompok tani yang digambarkan berikut ini merupakan kelompok tani peserta pengembangan ternak sapi terpadu di Kabupaten Bangka Tengah. Dari 56 kelompok tani yang disurvei, dipilih 12 kelompok tani dari 12 desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan ternak sapi terpadu. Kesiapan kelompok tani yang terpilih diprosikan dengan beberapa indikator, seperti motif

pembentukan kelompok tani, struktur organisasi, dan potensi kepemimpinan. Sementara kemampuan kelompok tani diproksikan dengan pematapan anggota kelompok, kelengkapan struktur organisasi, aktivitas kelompok, peran ketua/pengurus kelompok, penyampaian informasi, rencana kerja kelompok, mobilisasi pemupukan modal kelompok, kesepakatan kelompok, kerjasama/kemitraan, dan peningkatan intensitas komunikasi dengan penyuluh.

Dari masing-masing indikator tersebut di berikan bobot nilai, untuk aspek persiapan kelompok maksimum 500, sedangkan kemampuan kelompok dengan bobot nilai maksimum 1000. Nilai bobot ini selanjutnya didistribusikan kedalam setiap pertanyaan dalam bentuk kuisioner yang ditujukan kepada kelompok tani. Aspek persiapan kelompok memiliki 4 topik pertanyaan, yaitu (1) Motif pembentukan kelompok tani (maksimum 100), (2) Struktur kelompok tani (maksimum 100) dan (3) Potensi kepemimpinan (maksimum 300).

Sementara dari aspek kemampuan kelompok memiliki 10 topik pertanyaan; (1) Penyebaran dan daya serap informasi (maksimum 50), (2) Proses perencanaan (maksimum 200), (3) Kemampuan kerjasama dalam melaksanakan rencana (maksimum 200), (4) Kemampuan pengembangan fasilitas (maksimum 100), (5) Kemampuan pemupukan modal (maksimum 50), (6) Kemampuan mentaati perjanjian (maksimum 100), (7) Kemampuan dalam mengatasi hal-hal darurat (maksimum 50), (8) Pengembangan kader (maksimum 50), (9) Hubungan dengan kelembagaan pendukung (maksimum 100), dan (10) Tingkat produktivitas (maksimum 100).

Tabel 1 menunjukkan bahwa kesiapan kelompok tani yang terpilih dikategorikan “sedang“. Artinya, sebagian besar kelompok tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk mengembangkan ternak sapi terpadu. Demikian pula kemampuan kelompok tani dikategorikan memiliki kemampuan “sedang“ sehingga secara keseluruhan kinerja kelompok tani yang terpilih dikategorikan “sedang”.

Walaupun telah banyak lembaga kelompok tani yang dibentuk di Kabupaten Bangka Tengah, keberadaan sebagian besar kelompok tani sangat bervariasi; ada yang eksistensi dan kinerjanya sangat baik dan ada juga yang kurang baik atau tidak aktif sama sekali (Hermanto *et al.*, 2009). Kelompok tani yang berkinerja rendah dicirikan antara lain oleh: kelompok tani tidak mandiri, partisipasi anggota sangat kurang, kelompok tidak kompak serta sebagian kelompok tani sudah “bubar” namun masih terdaftar (Hermanto *et al.*, 2010).

Secara umum kelompok tani di Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan belum dapat berperan dan berfungsi sebagai organisasi usahatani yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan inovasi dan perluasan pemasaran. Longgarnya eksistensi kelompok tani ini karena beberapa alasan diantaranya: belum ada visi kepentingan yang sama diantara anggota, belum ada kader tani yang berdedikasi dalam menggerakkan petani lainnya, dan aspek *leadership* yang masih kurang.

Tabel 1. Skoring Kesiapan dan Kemampuan Kelompok Tani Peserta Program Pengembangan Ternak Sapi Terpadu di Kabupaten Bangka Tengah, 2010

No	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Anggota (org)	Kesiapan Kelompok	Kemampuan Kelompok	Total
1	SP. Perlang	Cinta Damai	30	270	499	769
2	Kel. Dul	Harapan Jaya	30	245	491	736
3	Jeruk	Selma Bakti	18	270	519	789
4	Lampur	Usaha Bersama	20	185	375	560
5	Kulur	Subur Abadi	26	270	505	775
6	Jelutung	Air Papan II	15	240	436	676
7	Guntung	Mekar Karya	25	270	420	690
8	Pasir Garam	Guyub Rukun	25	270	451	721
9	Namang	Keramat Permai	20	240	409	649
10	Krakas	Usaha Bersama	10	140	459	599
11	Celuak	Tunas Harapan	20	270	374	644
12	Kulur Ilir	Melati Air	12	270	414	684
	Rata-rata		24	214	376	591

Keterangan:

Kesiapan Kelompok : Rendah (100-<200), Sedang (200-<300), Tinggi (>300)

Kemampuan Kelompok : Rendah (200-<400), Sedang (400-<600), Tinggi (>600)

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kurang berfungsinya kelompok tani yang ada antara lain disebabkan oleh pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif, di mana petani sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) ditempatkan sebagai aktor yang menjalankan kelembagaan tersebut. Kelembagaan yang terbentuk tidak mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya.

Untuk mengaktifkan kelompok tani di Bangka Tengah, khususnya peserta program pengembangan ternak sapi terpadu, telah dilakukan pembinaan secara intensif, dengan melakukan pemantapan jumlah anggota, pembenahan struktur organisasi, pemantapan pranata, pemupukan modal, serta pengembangan kerjasama, baik antar anggota maupun antar kelompok. Saat ini semua kelompok tani peserta telah mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan kondisi sebelumnya (Tabel 2). Hal ini terlihat dari adanya pemupukan modal, pemantapan aturan main, serta peningkatan peran pengurus dalam mengembangkan berbagai aktivitas secara berkelompok. Misalnya, pengembangan tanaman rumput dan gamal untuk pakan sapi telah dilakukan secara gotong royong oleh anggota kelompok tani, yang sebelumnya jarang dilakukan (Hermanto *et al.*, 2010).

Tabel 2. Keragaan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Pengembangan Ternak Sapi Terpadu di Kabupaten Bangka Tengah, 2010

No	Desa	Nama Klp	Anggota (org)	Kelengkapan Struktur organisasi*	Pemupukan Modal	Aturan Main	Kerjasama antar Anggota	Kerjasama kelompok dengan pihak lain
1	Simpang Perlang	Cinta Damai	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	sudah
2	Kel. Dul	Harapan Jaya	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	belum
3	Jeruk	Selma Bakti	20	Lengkap	belum	belum	belum	belum
4	Lampur	Usaha Bersama	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	dirintis*
5	Kulur	Subur Abadi	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	belum
6	Jelutung	Air Papan II	20	Lengkap	belum	belum	sudah	belum
7	Guntung	Mekar Karya	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	belum
8	Pasir Garam	Guyub Rukun	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	belum
9	Namang	Keramat Permai	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	belum
10	Krakas	Usaha Bersama	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	belum
11	Celuak	Tunas Harapan	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	dirintis
12	Kulur Ilir	Melati Air	20	Lengkap	sudah	sudah	sudah	belum
	Rata-rata		20					

Keterangan: * struktur organisasi terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan beberapa seksi (sesuai kebutuhan)

Penguatan kelembagaan kelompok tani juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pertemuan atau musyawarah petani dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian, dan instansi terkait sehingga kelompok tani yang terbentuk makin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usahataniannya. Selain itu, di tiap lokasi juga telah dilakukan rekayasa sosial dengan maksud agar petani/peternak dapat memanfaatkan program tersebut secara berkelanjutan. Melalui rekayasa sosial diharapkan akan tumbuh rasa memiliki, partisipasi, dan pengembangan kreatifitas, yang disertai adanya dukungan dari masyarakat. Salah satu bentuk rekayasa sosial yang dikembangkan adalah membangun sistem perguliran antar anggota dan antar kelompok (Hermanto *et al.*, 2010).

Rekayasa sosial tersebut dikembangkan pada usaha pembibitan dan penggemukan sapi, dimana tiap orang dalam kelompok mendapatkan bantuan sapi sebanyak 4-5 ekor sapi (skala ekonomis). Pemeliharaan sapi, baik pola pembibitan maupun penggemukan dilakukan dengan sistem kelompok dengan menggunakan

kandang kolektif, yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, kelompok mendapatkan bantuan mesin pencacah rumput (*chopper*) dan mesin kompos masing-masing 1 unit per lokasi/desa.

Rekayasa sosial yang dikembangkan untuk usaha pembibitan adalah membangun sistem perguliran induk (5 kali bergulir, setelah itu sapi dijual dan dibeli induk untuk digulirkan lagi). Induk sapi digulirkan kepada anggota lain yang telah terdaftar sebagai penerima perguliran berikutnya, baik dalam kelompok maupun di luar kelompok setelah melahirkan satu anak sapi yang telah disusui induknya sekitar 3-4 bulan. Anak sapi tersebut menjadi milik dari petani penerima perguliran pertama, yang selanjutnya dipelihara diluar kandang kolektif atau ditempatnya masing-masing. Penerima guliran kedua kemudian akan memelihara induk sapi tersebut.

Apabila pemeliharaan sapi pada perguliran kedua melahirkan satu pedet (anak sapi), maka induknya akan digulirkan lagi kepada penerima perguliran yang ketiga, dan seterusnya. Rentang waktu perguliran pertama dan kedua sekitar 1,3-1,5 tahun, dengan asumsi bahwa sapi bakalan yang diterima petani/peternak adalah berukuran ideal sehingga target produksi yang dihasilkan, yaitu satu ekor induk menghasilkan satu anak sapi unggul dalam waktu satu tahun dapat diwujudkan.

Berbeda dengan usaha perbibitan, usaha penggemukan ditujukan untuk pemeliharaan sapi muda (umur 1,5-2 tahun) secara terus-menerus di dalam kandang dalam waktu tertentu untuk meningkatkan volume dan mutu daging dalam waktu relatif singkat. Target usaha penggemukan sapi adalah menghasilkan pertambahan bobot badan (PBB) antara 0,60-0,80 kg/ekor per hari, dimana satu periode penggemukan diperhitungkan sekitar 3-4 bulan. Perguliran pada usaha ini dilakukan berdasarkan penggantian pejantan dengan cara dibeli lagi pejantan minimal sesuai kondisi awal pada saat diterima dengan rentang waktu setelah 1,5 tahun, selebihnya milik petani. Artinya, rentang waktu perguliran pertama dan kedua dilakukan setelah 1,5 tahun, dengan asumsi usaha penggemukan sapi dapat dilakukan oleh petani/peternak sekitar 2-3 kali periode.

Studi Kasus Di Sumatera Selatan

Hasil kajian Hermanto *et al.* (2007) di 6 (enam) Kabupaten di Sumatera Selatan (Kabupaten OKI, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lahat, Banyuasin dan Kabupaten OKU Timur) menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu berdirinya kelompok tani mencapai 15 tahun dengan kisaran 2 sampai 32 tahun. Sejalan dengan lama waktu berdirinya kelompok tani maka luas garapan areal pertanian juga memiliki kisaran yang cukup besar yaitu antara 18,5 sampai 200 hektar dengan rata-rata 84 hektar per kelompok tani. Dengan luasan yang beragam tersebut, produksi padi kelompok tani berkisar antara 61,6 – 880 ton, dengan rata-rata 366,6 ton. Luas garapan anggota kelompok tani berkisar 0,5 – 2,25 ha dengan rata-rata 1,3 ha.

Eksistensi kelompok tani cukup mendapat perhatian dari masyarakat petani, yang dicerminkan oleh makin bertambahnya jumlah anggota kelompok tani tersebut. Rata-rata kenaikan jumlah anggota kelompok tani dalam kurun waktu tertentu mencapai 50 persen. Jika pada awalnya anggota kelompok tani jumlahnya rata-rata 26 orang saat ini rata-rata 39 orang.

Meningkatnya jumlah anggota kelompok tani tersebut disebabkan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan selama ini dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap aktivitas usahatani, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai manfaat yang dirasakan petani diantaranya adanya peningkatan pendapatan yang cukup signifikan sebagai dampak positif dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan petani. Disamping itu adanya kemudahan didalam mengakses lembaga keuangan baik formal maupun non formal dalam rangka mendapatkan modal usahatani.

Sekitar 86,7 persen kelompok tani mengaku adanya pembinaan dari pemerintah dalam melakukan aktivitasnya. Untuk menjalankan aktivitas usahatani, seringkali juga muncul permasalahan yang memang harus dipecahkan bersama dalam kelompok tani. Pertemuan rutin sering dilaksanakan yakni: tiap musim tanam (73,3%), tiap bulan (20%), dan tiap dua bulan (73,3%). Materi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai budidaya tanaman (73,3%), pengendalian hama dan penyakit (73,3%), waktu tanam serentak (33,3%), ketenagakerjaan (13,3%).

Selain itu, kelompok tani juga melakukan kerjasama dengan Rice Milling Unit (RMU). Bentuk kerjasama tersebut antara lain; (1) kerjasama penggilingan gabah kelompok tani (46,7%), (2) penjualan gabah (26,7%) dan (3) penggilingan dan penjualan gabah (26,7%). Kendala kerjasama antara kelompok tani dengan RMU adalah lemahnya permodalan (33,3%), mutu gabah yang rendah (13,3%) dan pinjaman kepada kelompok tani tanpa bunga (6,7%).

Sebagian anggota kelompok tani juga merupakan anggota lumbung pangan, bahkan beberapa kelompok tani menyatu menjadi anggota lumbung pangan. Demikian juga terhadap RMU, umumnya RMU membeli atau mendapatkan gabah untuk digiling dari anggota kelompok tani, baik secara individu maupun secara kolektif. Antara lumbung pangan dengan RMU juga memiliki hubungan kerjasama dalam hal penjualan dan penggilingan gabah lumbung pangan, dan sebagian kecil lumbung pangan memiliki unit usaha RMU. Ketiga lembaga tersebut melakukan kerjasama kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan.

Pola kerjasama yang selama ini sudah berjalan, seperti pembelian dan penjualan gabah, penggilingan gabah, penjualan saprodi, pemanfaatan gudang kelompok dan simpan pinjam. Bentuk kerjasama simpan-pinjam baik berupa uang maupun natura (gabah) adalah paling banyak dilakukan antara kelompok tani dengan lumbung pangan. Dalam hal ini lumbung pangan menyediakan kredit

simpan pinjam kepada kelompok tani. Bagi lumbung pangan yang belum bekerjasama dengan kelompok tani, pola kerjasama yang paling banyak diinginkan adalah usaha agribisnis yang saling menguntungkan (26,7%). Sedangkan bagi kelompok tani, pemanfaatan modal kelompok merupakan bentuk kerjasama yang paling banyak diinginkan (20,0 %).

Selanjutnya kerjasama penggilingan dan pembelian gabah merupakan bentuk kerjasama yang paling banyak dilakukan antara kelompok tani dan RMU. Kerjasama tersebut berjalan baik karena kelompok tani menghasilkan output berupa gabah yang sekaligus merupakan input bagi RMU untuk diproses menjadi beras. Bagi kelompok tani yang belum melakukan kerjasama dengan RMU, bentuk kerjasama yang paling diinginkan adalah penyediaan kredit modal kerja oleh RMU.

Bentuk kerjasama lainnya yang banyak ditemukan di lapangan adalah kerjasama antara lumbung pangan dengan RMU atau penggilingan padi. Kerjasama yang dilakukan antara lain; (1) penyimpanan gabah lumbung pangan (26,7%), (2) penggilingan gabah lumbung pangan (33,3%), (3) penyediaan kredit modal kerja lumbung pangan (6,7%) dan (4) kerjasama lainnya, seperti kesepakatan upah giling dan sewa alat pemoles (13,3%). Meskipun kerjasama kelompok lumbung pangan dengan penggilingan padi sudah berjalan cukup baik, namun permasalahan lemahnya permodalan (33,3%) masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan kerjasama tersebut.

Secara umum lembaga kelompok tani, lumbung pangan, dan penggilingan padi saling memiliki kepentingan satu sama lain. Sebagian anggota kelompok tani juga merupakan anggota lumbung pangan, bahkan beberapa kelompok tani, disamping menyatu menjadi anggota lumbung pangan juga sebagai pemilik RMU. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penumbuhan dan pengembangan kerjasama antara kelompok tani dan lumbung pangan, antara lain: (1) pemanfaatan bantuan modal kerja (13,3%), (2) pelatihan kelompok tani dan lumbung pangan (33,3%), (3) fasilitasi dalam memperoleh bantuan pemerintah (6,7%) serta (4) perlombaan lumbung pangan (6,7%).

Pembinaan juga dilakukan terhadap pengembangan kerjasama antara kelompok tani dengan RMU, seperti: (1) pelatihan bagi kelompok tani dan RMU (33%) dan (2) fasilitasi bantuan pemerintah (6,7%). Demikian halnya pembinaan terhadap pengembangan kerjasama RMU dengan lumbung pangan, yaitu dalam bentuk: (1) pelatihan bagi kelompok tani dan RMU (33,3%), (2) fasilitasi dalam memperoleh bantuan pemerintah (13,3%) dan (3) Kerjasama lainnya seperti sewa hand traktor (6,7%).

Pelajaran Berharga

Berdasarkan pengalaman di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, pelajaran berharga yang dapat dipetik adalah bahwa peranan dan fungsi kelompok

tani akan semakin meningkat apabila dapat menumbuh-kembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam kelompok itu sendiri untuk menggerakkan dan mendorong perilaku anggotanya ke arah pencapaian tujuan kelompok, sehingga kelompok tani tersebut berkembang menjadi lebih dinamis.

Dinamisasi individu dalam kelompok dapat menimbulkan semangat untuk mempercepat dan terjadinya akselerasi dalam pembangunan pertanian di perdesaan. Karena itu, diperlukan kondisi dimana semangat bersama muncul dari kelompok tani untuk mengubah cara pandang bertani secara individu menjadi orientasi baru dengan mengembangkan berbagai inovasi dalam usaha meningkatkan produksi dan pendapatan.

Karakter kelompok tani umumnya dapat dibagi menjadi: (1). kelompok tani yang mudah dan langsung menerima inovasi baru, (2). kelompok yang baru mau menerima inovasi setelah melihat hasil dari petani lain, dan (3). kelompok tani penentang. Di Bangka Belitung umumnya mereka termasuk kedalam kelompok tani yang dapat menerima inovasi baru setelah melihat hasil. Artinya, mereka akan termotivasi setelah melihat secara langsung keberhasilan yang telah dicapai oleh petani dan atau kelompok tani lain. Hal ini menjadikan percontohan inovasi baru sebagai langkah strategis untuk mempermudah dalam implementasi dari berbagai program pembangunan pertanian di perdesaan.

Sebaliknya di Sumatera Selatan, umumnya mereka termasuk kedalam kelompok tani yang relatif mudah untuk menerima inovasi baru. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari kelompok tani telah mengalami perjalanan sejarah panjang dalam pembentukannya, sehingga menimbulkan kemantapan karakter dalam berkelompok. Secara umum karakter kelompok tani di Sumatera Selatan dapat dicirikan oleh cara berpikir yang rasional dan demokratis, berorientasi pada produktivitas, serta penerapan inovasi oleh anggota telah mewarnai pertimbangannya dalam melibatkan anggota untuk melaksanakan berbagai kegiatan individu maupun kelompok.

Cara berpikir seperti ini akan mendorong anggota kelompok mencari kegiatan yang produktif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh anggota serta secara teknis dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki anggota. Selain itu, cara berpikir yang demokratis, juga telah menyadari martabat orang lain, dan berani menghadapi tantangan untuk memahami aspirasi anggotanya dan menempatkannya sebagai pelaku utama dalam semua kegiatan kelompok. Demikian pula peran pengurus dalam memberdayakan anggotanya, tidak semata-mata untuk meningkatkan kemampuan diri anggota, namun juga untuk mendorong anggota bersedia mengikuti perkembangan yang terjadi. Sebagai contoh misalnya penggunaan traktor sebagai pengganti cangkul merupakan bentuk nyata penerapan cara berpikir yang menganut prinsip modern.

PENGUATAN KELOMPOK TANI

Mengingat makin kompleks dan besarnya tantangan pembangunan pertanian masa mendatang, terutama untuk mencapai kesejahteraan petani, maka kelembagaan kelompok tani yang tersebar di seluruh pelosok perdesaan perlu dibenahi dan diberdayakan, sehingga mempunyai keberdayaan dalam melaksanakan usahatani. Untuk mencapai keberdayaan tersebut, program pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan harus dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam hal; (1) memahami kekuatan (potensi) dan kelemahan kelompok; (2) memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi, pada saat ini dan masa mendatang; (3) memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan (4) menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan.

Pada umumnya potensi kelembagaan kelompok tani di perdesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dilaksanakan karena kelompok tani inilah pada dasarnya pelaku utama pembangunan pertanian. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah kelompok tani tercatat sebesar 293.568 kelompok tani (Syahyuti, 2007). Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk kegiatan belajar, bekerja sama, dan pemupukan modal kelompok dalam mengembangkan usahatani, jika pemberdayaan kelompok tersebut dapat dilakukan secara baik.

Pentingnya pemberdayaan kelompok tani tersebut sangat beralasan karena keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini, terutama sejak era otonomi daerah, ada kecenderungan perhatian pemerintah daerah terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang, bahkan terkesan diabaikan sehingga kelembagaan kelompok tani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan pertanian belum berfungsi secara optimal.

Apalagi saat ini banyak kelompok tani yang melupakan modal utama sebuah kelompok tani, yaitu kekompakan dan tekad untuk maju. Dua hal inilah yang menjadi ruh sebuah kelompok tani. Jika tanpa adanya kekompakan dan tekad, maka kelompok tani tersebut berjalan tetapi bagaikan tanpa ruh. Sebagian besar kelompok tani hanya berlomba-lomba mendapatkan modal yang banyak, baik dengan iuran anggota, tabungan, maupun meminta bantuan dari pemerintah. Namun jika kelompok tersebut berjalan tanpa didasari rasa kompak dan tekad yang kuat dipastikan dalam waktu singkat kelompok tersebut tidak akan aktif lagi. Oleh karena itu, kekuatan utama dari sebuah kelompok tani itu bukanlah dari berapa besar modal yang dimiliki kelompok tetapi dari seberapa besar rasa kompak dan berapa besar tekad dari kelompok tani untuk maju.

Memang kekompakan sebuah kata yang mudah diucapkan tetapi sangatlah sulit untuk dilaksanakan dan diwujudkan. Kekompakan membutuhkan syarat yang tidak mudah. Salah satu persyaratannya adalah rasa kepercayaan antar anggota dan kepercayaan anggota kepada pengurus kelompok tani. Untuk mewujudkan sebuah kepercayaan dari anggota dibutuhkan kepengurusan kelompok yang bertanggung jawab dan berwibawa. Pelaporan segala kegiatan dan penggunaan keuangan kelompok wajib dilakukan tiap bulan. Hal ini bertujuan untuk mengikis rasa curiga dari para anggota kepada pengurus kelompok tani.

Dari berbagai potret kelompok tani, sebagian besar kelompok tani masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya kendala yang bersifat internal maupun external, antara lain (Purwanto *et al.*, 2007; Hermanto *et al.*, 2010) :

1. Kelompok tani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan koordinasi apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian dan keberlanjutan kelompok.
2. Partisipasi dan kekompakan anggota dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok yang hanya mencapai 50%.
3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.
4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.
5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan secara *top-down* berdasarkan pendekatan cetak biru (*blue print approach*) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.
6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang *top down*, menghambat tumbuhnya partisipasi masyarakat.
7. Kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya tawar mereka. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.

8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontak tani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok, karena tidak ada *social learning approach*.
9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

Sesungguhnya upaya menumbuh-kembangkan kelompok tani di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman orde baru, pengembangan kelompok tani telah dilakukan secara intensif, sehingga dilihat dari jumlahnya tiap tahun terus meningkat (Unang, 2009). Meskipun kelompok tani yang terbentuk cukup banyak, namun sebagian besar kelompok tani tersebut masih belum berfungsi efektif untuk kepentingan para anggotanya.

Efektivitas kelompok (*group effectiveness*) menurut Hubeis (2000) adalah keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun non fisik) yang memuaskan anggota kelompok. Karena itu, efektivitas kelompok tani harus dilihat dari: (1) produktivitas, yaitu keberhasilan mencapai tujuan kelompok; (2) moral berupa semangat dan sikap para anggotanya; dan (3) kepuasan, yakni keberhasilan anggota mencapai tujuan-tujuan pribadi (Slamet, 1978).

Selama ini efektivitas dari sebagian besar kelompok tani masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh: (1) masih terbatasnya peran pengurus kelompok tani, (2) anggota kelompok tidak jelas, (3) struktur organisasi tidak lengkap dan tidak berfungsi, (4) produktivitas usahatani rendah, (5) kurangnya pembinaan dari aparat penyuluh, dan (6) pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya. Bahkan kelembagaan kelompok tani sering dibentuk secara temporer dan hanya aktif pada saat-saat tertentu, seperti terlihat dalam fenomena pendistribusian bantuan pupuk bersubsidi, atau bantuan-bantuan lainnya.

Walaupun keberadaan kelompok tani telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian berbagai program pembangunan pertanian, namun paradigma pengembangan kelompok tani masih kurang tepat. Pengembangan kelompok tani, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah cenderung membuat kelompok tani menjadi kelompok formal. Hal ini mengakibatkan kelompok tani yang semula bersifat kelompok sosial (*social groups*) terpaksa berkembang menjadi kelompok tugas (*task groups*), karena terlampaui banyaknya intervensi luar terhadap kelompok tani tersebut.

Keberadaan kelompok tani penting diberdayakan karena potensinya sangat besar. Tetapi jika hanya mengandalkan tenaga penyuluh yang saat ini tersedia sekitar 25 ribu orang untuk 60 juta petani adalah sangat tidak realistis. Bahkan jumlah yang 25 ribu orang tersebut masih menyusut karena sebagian diantaranya sedang dalam pendidikan, pra-jabatan, tidak ada di lokasi tugas atau sedang dibebani tugas administratif kantor. Penyuluh yang siap terjun ke lapangan juga masih terbentur ketiadaan alat transportasi, sehingga mobilitasnya tidak memadai. Sulit untuk berharap penguatan kelompok tani akan terwujud dengan berbagai keterbatasan tersebut.

Secara umum ada tiga hal yang menunjukkan kekuatan suatu kelompok, yaitu (1) kemampuan kelompok tersebut dalam mencapai tujuan, (2) kemampuan kelompok dalam mempertahankan kelompoknya agar tetap serasi, selaras dan seimbang, dan (3) kemampuan kelompok untuk berkembang dan berubah sehingga dapat terus meningkatkan kinerjanya. Kelompok yang berhasil akan mempunyai kualitas dan pola interaksi antar anggota yang terintegrasi dengan ketiga kegiatan ini (Hermanto, 2010).

Upaya penguatan kelembagaan kelompok tani merupakan suatu pekerjaan yang tidak ringan, bahkan membutuhkan waktu dan sumberdaya finansial yang cukup. Namun demikian penguatan kelembagaan tersebut harus dilakukan untuk menuju kemandirian kelompok tani. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan strategis yang diperlukan dalam penguatan kelompok tani, antara lain;

- Menciptakan iklim yang kondusif di dalam lingkungan kelompok tani, seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota kelompok tani, antar kelompok tani, antar kelompok tani dengan pembinanya (penyuluh, petugas lainnya) sehingga pembinaan terhadap kelompok mampu membentuk dan menumbuhkembangkan kelompok tani secara partisipatif (*dari, oleh, dan untuk petani*);
- Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani untuk memanfaatkan tiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan anggota kelompok untuk melakukan perubahan melalui cara berpikir rasional, terbuka terhadap ide baru, berorientasi pada iptek, menghargai prestasi, efisien, produktif, memiliki perhitungan untuk bertindak dan berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri serta tidak fatalistis.
- Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahatani. Untuk itu, kelompok tani perlu dibekali dengan keterampilan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang akurat;

- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses kelompok tani terhadap informasi. Untuk itu, pengembangan sistem informasi melalui jejaring kerja yang lebih luas sangat dibutuhkan agar kelompok tani dapat lebih responsif terhadap berbagai perubahan kemajuan di bidang pertanian.
- Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkembangkan kerjasama antar anggota dalam kelompok tani. Kerjasama setiap anggota yang terlibat dapat diarahkan agar mampu berinteraksi untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja usahatannya secara berkelanjutan;
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar, baik dilihat dari kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan bimbingan dan dukungan yang diarahkan agar anggota kelompok mau mempelajari dan mencoba sesuatu inovasi yang baru;
- Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi lokal spesifik. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong adanya kompetensi sehat dari anggota kelompok untuk menciptakan teknologi lokal spesifik. Di sinilah pentingnya kelompok tani memberi kepercayaan kepada anggota dalam mempraktekkan teknologi pertanian sesuai dengan usahanya masing-masing;
- Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran untuk mengembangkan modal kelompok. Disamping itu, pemberian bantuan permodalan berupa kredit kepada anggota kelompok juga penting untuk membantu mereka dalam mengembangkan modal usaha dengan memanfaatkan ketrampilan yang dimilikinya dalam upaya meningkatkan pendapatannya.

Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, maka diperlukan beberapa langkah operasional sebagai berikut:

Langkah I; mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Anggota kelompok haruslah terdiri dari petani yang mempunyai kepentingan sama dan saling percaya, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi. Bimbingan dan bantuan kemudahan yang diberikan oleh instansi pembina atau pihak lain haruslah yang mampu menumbuhkan kemandirian kelompok tani tersebut.

Langkah II; menumbuhkembangkan kelompok tani melalui; (1) peningkatan fasilitasi dan akses permodalan bagi petani dalam kerangka pengembangan skala usaha, (3) peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) melalui konsolidasi petani dalam satu wadah kelompok tani untuk menyatukan gerak ekonomi secara berkelompok dalam tiap rantai pasok, dari pra produksi sampai pemasaran. (4) peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, serta (5) peningkatan efisiensi usahatani.

Langkah III; meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota, seperti kursus kewirausahaan, manajemen partisipatif, pengembangan motivasi berprestasi dan magang/studi banding. Peningkatan kapasitas SDM petani ini perlu mendapat perhatian yang serius, terutama upaya pengembangannya yang harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh agar keberadaan organisasi petani dapat meningkatkan kesejahteraan petani, bukan dijadikan sebagai kuda tunggangan untuk kepentingan politik, sosial dan ekonomi pihak-pihak tertentu.

Dalam upaya penguatan kelompok tani ini, secara teknis dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dipandang mampu dan berpengalaman dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini tugas pendamping adalah mengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dan anggotanya dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

PENUTUP

Telah demikian banyak kelompok tani yang dibentuk, namun sebagian besar kinerjanya belum seperti yang diharapkan. Keberadaan kelompok tani umumnya saat ini dicirikan antara lain: (1) kelompok tani tidak mandiri, (2) partisipasi anggota sangat kurang, (3) sebagian kelompok tidak kompak dan sebagian lagi sudah “bubar” namun masih terdaftar. Meskipun demikian berdasarkan pengalaman di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, ternyata peranan dan fungsi kelompok tani dapat ditingkatkan dengan menumbuhkembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam kelompok itu sendiri agar dapat menggerakkan dan mendorong perilaku anggotanya ke arah pencapaian tujuan kelompok. Oleh karena itu, upaya penguatan kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Langkah-langkah operasional yang dapat dilakukan dalam upaya penguatan kelompok tani, antara lain: (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-

kembangkan kelompok tani melalui peningkatan akses permodalan bagi petani, peningkatan posisi tawar (*bargaining position*), fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, G.S. dan M. Aminah. 2009. Faktor-Faktor Dominan dalam Pembentukan Lembaga Sosial. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 27 No. 1, Juli 2009 : 29. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Djiwandi, 1994. Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Kecepatan Adopsi Teknologi Usahatani di Kabupaten Sukoharjo. Laporan Penelitian. Tidak Dipublikasikan.
- Hermanto, Hasnelly, Suwardih, I. A. Fachrista, Fajri, Nuraini, Minas, A. Wirastri, A. Phoppy, M, D.Pertiwi, Issukindarsyah, M. Sarwendah, Sugito, Agung, R. Maya. 2009. Identifikasi dan Rancang Bangun Pengembangan Ternak Sapi Terpadu di Kabupaten Bangka Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- Hermanto, Suwardih, I. A. Fachrista dan Zikril. 2010. Laporan Utama: Pengembangan Ternak Sapi Terpadu di Kabupaten Bangka Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- Hermanto, Yanter, dan Jauhari. 2007. Pembinaan dan Analisis Pola Kerjasama Masyarakat dengan Penggilingan Padi/Lumbung Pangan. Laporan Akhir Pengkajian. Badan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan.
- Hermanto. 2010. Pengembangan Kelembagaan Petani. Opini, Bangka Pos, 16 Januari 2010.
- Hermanto. 2007. Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan. Jurnal AKP 5(2):110-125, Juni 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Hubeis, A.V.S. 2000. Suatu Pikiran Tentang Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Petani. Deptanhut. Jakarta.
- Mosher, A.T. 1987. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi . CV Yasaguna
- Purwanto, M. Syukur, dan P. Santoso, 2007. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di Jawa Timur. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Malang. Jawa Timur.

- Slamet, M. 1978. Beberapa Catatan tentang Pengembangan Organisasi Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Suntoro, A.W. 2007. Petani : Pahlawan Kehidupan yang Terabaikan. Solo Pos, 21 April 2007.
- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 5 no. 1. Maret
- Unang, Y. 2009. Kepemimpinan Ketua Kelompok dan Hubungannya Dengan Keefektifan Kelompok (Kasus pada Kelompok Tani Ternak Sapi Perah di Wilayah Kerja Koperasi Serba Usaha Tandangsari Sumedang). Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran (http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/kepemimpinan_ketua_kelompok.pdf)
- Zakaria W.A. 2003. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani. Fakultas Pertanian Universitas Lampung.